

ANALISIS KEBIJAKAN EVALUASI DAN PEMBELAJARAN DAN INOVASI STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

Weni Yulastri¹, Zilfa Yeni², Meri Yessari³, Bismi Afia⁴, Yolanda Rahamadani Putri⁵, Devira Syafitri Amizi⁶, Azizah Nurazila⁷

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Dasar S2, Universitas Adzkia

e-mail: [¹](mailto:weniyulastri@adzkia.ac.id), [²](mailto:zilfayeni89@guru.sd.belajar.id),
[³](mailto:meriyessari01@gmail.com), [⁴](mailto:bismiafia92@guru.sd.belajar.id),
[⁵](mailto:ndayola320@gmail.com), [⁶](mailto:d.syafitriamizi@adzkia.ac.id),
[⁷](mailto:azizahnurazila820@gmail.com).

ABSTRACT

This article discusses the policy issues in elementary schools related to learning evaluation in the context of the simultaneous implementation of two curricula, namely the 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum. The main problems include the mismatch in implementation, suboptimal learning evaluation, and limitations in resources and infrastructure. The methods used in this article are literature review and field observation. The analysis results indicate that policy innovations such as strengthening formative assessments, curriculum flexibility, teacher training, and the use of technology are essential to enhance independent learning and overall educational quality. This article recommends evidence-based and participatory policy formulation strategies.

Keywords: educational policy, formative assessment, Merdeka curriculum, learning innovation, independent learning.

ABSTRAK

Artikel ini membahas permasalahan kebijakan di sekolah dasar terkait evaluasi pembelajaran dalam konteks pelaksanaan dua kurikulum secara bersamaan, yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Permasalahan utama meliputi ketidaksesuaian implementasi, evaluasi pembelajaran yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka dan observasi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa inovasi kebijakan berupa penguatan asesmen formatif, fleksibilitas kurikulum, pelatihan guru, serta pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan pembelajaran mandiri dan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Artikel ini merekomendasikan strategi perumusan kebijakan berbasis bukti dan partisipatif.

Kata Kunci: *kebijakan pendidikan, asesmen formatif, kurikulum merdeka, inovasi pembelajaran, pembelajaran mandiri*

A. Pendahuluan

Permasalahan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dasar menjadi isu penting yang terus menjadi sorotan, terutama dalam era perubahan kurikulum yang dinamis. Kebijakan pendidikan bukan sekadar pedoman administratif, melainkan menjadi fondasi dalam membentuk arah dan mutu proses belajar mengajar. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, sebagai upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan abad ke-21, seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemandirian belajar. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah, terutama di tingkat dasar, masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kedua kurikulum tersebut secara bersamaan.

Perbedaan struktur, pendekatan pembelajaran, dan sistem evaluasi antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menciptakan kebingungan di kalangan pendidik dan pemangku kepentingan sekolah. Beberapa kelas masih menggunakan Kurikulum 2013, sementara kelas lainnya sudah beralih ke Kurikulum Merdeka. Akibatnya, pendekatan asesmen yang digunakan juga tidak seragam. Hal ini berimplikasi pada pelaporan hasil belajar siswa yang tidak konsisten, menyulitkan dalam akuntabilitas pendidikan, dan berisiko menciptakan ketimpangan hasil belajar antar kelas bahkan dalam satu sekolah.

Evaluasi pembelajaran merupakan komponen integral dalam sistem pendidikan, tidak hanya untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam menyerap materi pelajaran, tetapi juga sebagai alat refleksi bagi guru dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi yang baik

berfungsi memantau kemajuan belajar, memberikan umpan balik konstruktif, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, menentukan kenaikan kelas, hingga menjadi alat untuk merancang intervensi atau remedial. Sayangnya, pelaksanaan evaluasi di banyak sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala.

Kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep asesmen formatif dan autentik, yang menekankan pada proses dan hasil belajar secara utuh. Banyak guru masih berorientasi pada asesmen sumatif semata, yaitu ujian akhir yang menekankan angka dan nilai, bukan pada proses belajar. Hal ini diperparah dengan keterbatasan pelatihan profesional yang diberikan kepada guru terkait pendekatan asesmen yang relevan dengan Kurikulum Merdeka. Belum lagi kendala infrastruktur seperti keterbatasan akses teknologi, ruang belajar yang tidak memadai, hingga beban administrasi guru yang tinggi, yang semuanya menghambat pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang ideal.

Selain itu, konteks sosial ekonomi juga turut berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan evaluasi pembelajaran. Siswa dari keluarga kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber belajar tambahan maupun teknologi penunjang asesmen berbasis digital. Ini menimbulkan kesenjangan hasil belajar antar siswa yang berpotensi diperparah jika kebijakan evaluasi tidak mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

Dalam kondisi tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan evaluasi pembelajaran yang berbasis bukti dan kontekstual. Kebijakan tersebut harus mampu

mendorong terciptanya sistem evaluasi yang inklusif, adil, dan mendorong pembelajaran yang bermakna. Evaluasi tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, tetapi menjadi alat strategis dalam menumbuhkan karakter belajar siswa, termasuk kemandirian, rasa ingin tahu, dan kemampuan reflektif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam permasalahan kebijakan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut, serta menawarkan solusi berupa strategi perumusan dan inovasi kebijakan berbasis pendekatan sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan arah dan panduan yang jelas bagi sekolah dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga humanis dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap siswa secara maksimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap realitas kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dasar, khususnya dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menangkap fenomena kompleks yang terjadi di lapangan secara utuh, kontekstual, dan bermakna. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengeksplorasi tantangan dan peluang kebijakan asesmen dalam situasi implementasi dua kurikulum secara bersamaan (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka), serta

merumuskan solusi inovatif berbasis bukti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua strategi utama, yaitu kajian pustaka (*library research*) dan observasi lapangan (*field observation*). Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku akademik, laporan kebijakan pendidikan, serta dokumen resmi pemerintah terkait evaluasi pembelajaran, asesmen formatif, dan pengembangan kurikulum. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk merumuskan kerangka konseptual, membandingkan praktik lokal dengan praktik terbaik (*best practices*) global, serta mengidentifikasi gap atau kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Menurut Sugiyono (2021), kajian pustaka merupakan bagian integral dalam metode penelitian kualitatif, karena dapat membantu membangun landasan teoritis yang kokoh, memperkuat validitas interpretasi data, dan memperluas cakupan analisis melalui dialog antara teori dan praktik. Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber seperti:

1. *Black & William (1998)* tentang dampak asesmen formatif terhadap pembelajaran,
2. *Heritage (2007)* tentang kebutuhan kompetensi guru dalam asesmen,
3. *Suyanto & Lestari (2017)* tentang implementasi asesmen autentik dalam konteks Indonesia,
4. *Hardianto & Widodo (2019)* mengenai persepsi guru terhadap asesmen formatif.

Sementara itu, observasi lapangan dilaksanakan di SD Negeri 9 Padang Panjang Timur, sebuah

sekolah dasar negeri di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan panduan observasi terstruktur untuk mencatat praktik pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada kelas-kelas yang menggunakan dua kurikulum berbeda. Peneliti mencermati berbagai aspek pelaksanaan asesmen, seperti metode yang digunakan guru, jenis instrumen penilaian yang dikembangkan, dokumentasi pelaporan hasil belajar, serta keterlibatan siswa dalam proses refleksi belajar.

Observasi ini juga mencakup interaksi antara guru, siswa, dan orang tua, serta pengaruh kebijakan sekolah terhadap strategi evaluasi yang diterapkan. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan nyata yang dihadapi guru dan sekolah dalam menyelaraskan kebijakan evaluasi antar dua kurikulum, termasuk kendala teknis, administratif, dan pedagogis.

Data yang diperoleh dari kajian pustaka dan observasi dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar kategori data. Untuk meningkatkan validitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (dokumen, observasi, dan referensi teori) guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Analisis dilakukan secara induktif, dengan menelusuri keterkaitan antara praktik evaluasi di sekolah dengan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya. Hasil

akhir dari metode ini adalah rumusan persoalan kebijakan yang tajam, serta usulan solusi dalam bentuk opsi kebijakan dan inovasi pembelajaran yang kontekstual, layak diterapkan, dan berbasis data lapangan.

Dengan menggabungkan antara kekuatan teori (melalui kajian pustaka) dan realitas praktik (melalui observasi), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan evaluasi pembelajaran yang lebih efektif, adil, dan mendorong pembelajaran mandiri di tingkat sekolah dasar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Permasalahan Kebijakan Evaluasi Pembelajaran

Permasalahan utama yang ditemukan dalam konteks kebijakan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar meliputi implementasi kurikulum yang tidak seragam, perbedaan bentuk dan pendekatan asesmen antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta kendala administrasi dalam pelaporan hasil belajar siswa. Ketiga isu ini saling berkaitan dan memberikan dampak yang kompleks terhadap efektivitas proses pembelajaran dan asesmen di tingkat satuan pendidikan.

Pertama, ketidaksamaan implementasi kurikulum menimbulkan dualisme pendekatan dalam kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Di banyak sekolah, termasuk SD Negeri 9 Padang Panjang Timur, masih diterapkan dua kurikulum sekaligus—yakni Kurikulum 2013 di kelas-kelas tertentu (fase awal dan akhir) dan Kurikulum Merdeka di kelas lainnya. Kondisi ini mengakibatkan sekolah harus menjalankan dua sistem perencanaan pembelajaran, strategi asesmen, dan pelaporan hasil belajar

secara bersamaan. Hal ini tentu membebani guru dari sisi administrasi dan teknis pelaksanaan di kelas. Guru dituntut untuk memahami karakteristik, prinsip, dan perangkat asesmen dari kedua kurikulum tersebut secara mendalam, yang pada praktiknya sering kali tidak ideal.

Kedua, perbedaan pendekatan asesmen dalam dua kurikulum tersebut memperdalam kebingungan di lapangan. Kurikulum 2013, meskipun telah memperkenalkan konsep asesmen autentik, masih banyak menekankan pada penilaian sumatif berbasis angka dan capaian standar kompetensi. Sementara Kurikulum Merdeka lebih mengedepankan asesmen formatif dan holistik, yang menuntut guru untuk memantau proses belajar siswa secara berkelanjutan, merefleksikan kemajuan belajar, dan memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif serta membangun. Perbedaan paradigma ini menuntut transformasi mindset guru, namun dalam kenyataannya, banyak guru masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi asesmen formatif.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Hardianto & Widodo (2019) yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru sekolah dasar mengalami kesulitan dalam menerapkan asesmen formatif, terutama karena mereka belum memahami secara utuh pedoman teknis dari kurikulum yang digunakan. Bahkan, sebagian guru cenderung melaksanakan asesmen formatif sekadar sebagai formalitas, tanpa pemaknaan reflektif yang sejatinya merupakan inti dari asesmen tersebut. Mereka lebih fokus pada pengumpulan nilai akhir untuk pelaporan daripada menjadikan asesmen sebagai alat untuk

mendiagnosis dan memperbaiki proses belajar.

Ketiga, aspek administrasi pelaporan hasil belajar juga menjadi tantangan yang signifikan. Karena terdapat dua kurikulum yang berjalan secara paralel, sekolah perlu membuat dua sistem pelaporan berbeda. Format dan isi rapor yang digunakan pun tidak seragam, terutama dalam hal deskripsi capaian kompetensi siswa, penggunaan istilah, skala penilaian, dan pelibatan orang tua dalam interpretasi hasil belajar. Situasi ini sering menimbulkan kebingungan, baik di tingkat guru maupun orang tua siswa. Guru juga menghadapi beban administratif yang lebih tinggi, karena harus menyesuaikan dua sistem evaluasi dan membuat laporan yang berbeda untuk siswa dalam kelas yang sama secara jenjang, namun berbeda dalam pendekatan kurikulumnya.

Selain itu, belum semua guru mendapatkan pelatihan menyeluruh terkait penerapan asesmen formatif dan pelaporan hasil belajar berbasis Kurikulum Merdeka. Program pelatihan yang ada cenderung bersifat singkat dan formalitas, tanpa pendampingan yang memadai. Akibatnya, terdapat gap antara pemahaman teoretis dan praktik nyata di kelas. Guru-guru yang mengalami kesulitan ini sering kali mencari solusi sendiri atau mengandalkan diskusi informal dengan rekan sejawat, yang belum tentu sesuai dengan kebijakan dan standar nasional.

Dengan demikian, problematika ini tidak hanya berdampak pada efektivitas evaluasi pembelajaran, tetapi juga berpengaruh pada keadilan dan akuntabilitas proses belajar siswa. Siswa berpotensi mengalami ketidakkonsistenan dalam umpan balik yang mereka terima, serta kerancuan dalam cara penilaian dan

pelaporan, tergantung dari kurikulum yang berlaku di kelas mereka. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang tegas, pelatihan yang komprehensif, serta integrasi sistem pelaporan yang adaptif agar guru dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran secara konsisten, efektif, dan bermakna di tengah dinamika perubahan kurikulum yang sedang berlangsung.

Faktor Penyebab Permasalahan Kebijakan

Faktor internal dan eksternal menjadi penyebab utama tidak optimalnya kebijakan evaluasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar, khususnya dalam pelaksanaan asesmen formatif dan autentik yang menjadi tuntutan dalam Kurikulum Merdeka. Faktor internal terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman guru terhadap konsep dan praktik asesmen autentik, serta keterbatasan pelatihan profesional yang mereka terima. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kekurangan infrastruktur pendukung, serta tekanan yang berlebihan terhadap capaian hasil ujian sebagai indikator utama keberhasilan siswa.

Pertama, dari aspek internal, banyak guru di sekolah dasar belum sepenuhnya memahami esensi dan penerapan asesmen autentik. Dalam praktiknya, asesmen autentik bukan sekadar menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata. Asesmen ini menuntut guru untuk mengembangkan instrumen penilaian yang kompleks dan kontekstual, seperti proyek, portofolio, observasi, dan refleksi diri siswa. Namun, banyak guru masih terpaku pada metode penilaian tradisional seperti ulangan tulis dan tes objektif

karena keterbatasan wawasan dan pengalaman.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan guru yang berkelanjutan dan bersifat aplikatif. Program pelatihan seringkali tidak menyentuh kebutuhan praktis guru di lapangan, dan dilaksanakan secara singkat serta terpusat, tanpa ada pendampingan langsung dalam pengembangan perangkat asesmen atau praktik kelas. Akibatnya, pemahaman guru tentang asesmen autentik cenderung dangkal, dan mereka kesulitan menerapkannya secara konsisten dan bermakna dalam pembelajaran.

Kedua, dari aspek eksternal, banyak sekolah menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur pendukung seperti perangkat teknologi, ruang belajar yang fleksibel, dan media pembelajaran yang bervariasi. Padahal, asesmen autentik dan formatif yang ideal sangat bergantung pada lingkungan belajar yang mendukung aktivitas eksploratif, kolaboratif, dan reflektif. Di sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas, guru tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan asesmen berbasis proyek, observasi langsung, atau penggunaan teknologi pendidikan yang mendukung personalisasi pembelajaran.

Lebih jauh, budaya pendidikan yang masih menekankan pada hasil ujian sebagai tolok ukur utama keberhasilan turut menjadi hambatan. Tekanan terhadap nilai ujian—baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun kebijakan pendidikan nasional—menyebabkan guru lebih fokus pada penyampaian materi yang “diujikan” daripada membangun pemahaman konseptual siswa. Mereka cenderung mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian akhir melalui latihan-latihan soal atau drilling, yang

pada gilirannya mengesampingkan asesmen formatif dan strategi belajar yang lebih bermakna.

Sebagaimana dikemukakan oleh Au (2009) dalam karyanya *Unequal by Design*, fokus yang berlebihan terhadap ujian sumatif tidak hanya menghambat pembelajaran bermakna, tetapi juga memperkuat ketimpangan pendidikan. Sekolah-sekolah di lingkungan yang secara sosial dan ekonomi lebih tertinggal akan semakin tertekan oleh tuntutan nilai tinggi tanpa memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapainya. Guru-guru di sekolah tersebut pun lebih terdorong untuk “mengajar untuk ujian” (teaching to the test) daripada mengembangkan proses belajar yang membangun karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa.

Kondisi ini memunculkan ketimpangan kualitas asesmen antara satu sekolah dengan yang lain, tergantung pada tingkat pemahaman guru, pelatihan yang tersedia, serta dukungan infrastruktur dan budaya evaluasi yang berlaku. Dampaknya adalah ketidakmerataan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa, yang justru bertentangan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan diferensiasi, kemandirian belajar, dan keadilan pendidikan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan intervensi kebijakan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki sistem asesmen dari sisi regulasi, tetapi juga menguatkan kapasitas guru, menyediakan sarana pendukung yang memadai, dan mengubah budaya pendidikan agar lebih menghargai proses belajar daripada sekadar hasil ujian. Ini menegaskan bahwa reformasi kebijakan asesmen harus bersifat sistemik dan didukung oleh strategi

pelatihan serta pembinaan guru yang berkesinambungan.

Strategi Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan yang efektif dalam pendidikan, khususnya terkait evaluasi pembelajaran, harus dimulai dari proses yang sistematis dan berbasis bukti. Langkah awal yang paling fundamental adalah melakukan identifikasi masalah secara spesifik. Dalam konteks ini, misalnya, masalah yang dihadapi dapat berupa implementasi asesmen formatif yang tidak optimal, atau adanya kesenjangan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran akibat dualisme kurikulum (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka) di sekolah dasar.

Setelah masalah diidentifikasi dengan jelas, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis literatur, yaitu menelaah berbagai penelitian dan publikasi akademik yang relevan untuk memahami bagaimana masalah serupa dihadapi dan dipecahkan dalam konteks lain. Tinjauan pustaka ini sangat penting untuk menghindari pembuatan kebijakan yang bersifat spekulatif atau tidak kontekstual.

Misalnya, Black & Wiliam (1998) dalam penelitian klasik mereka menegaskan bahwa asesmen formatif yang dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan, terutama bagi siswa dengan performa rendah. Mereka menemukan bahwa asesmen yang disertai dengan umpan balik yang konstruktif mampu memperkuat motivasi siswa, memperbaiki kesalahpahaman konsep, dan mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Hal ini memperkuat argumen bahwa asesmen formatif bukan hanya alat penilaian, tetapi bagian integral dari proses belajar-mengajar.

Demikian pula, Heritage (2007) menekankan pentingnya kompetensi guru dalam menerapkan asesmen formatif secara efektif. Guru tidak cukup hanya mengetahui teknik evaluasi, tetapi juga harus mampu memahami data asesmen untuk merancang intervensi pembelajaran yang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan kebijakan, tidak cukup hanya mewajibkan asesmen formatif diterapkan, tetapi juga harus ada dukungan pengembangan kapasitas guru secara terstruktur dan berkelanjutan.

Selanjutnya, konsultasi dengan pemangku kepentingan pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua siswa juga menjadi tahapan penting. Konsultasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh perspektif lapangan, tetapi juga untuk membangun legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan akan memperkuat relevansi kebijakan dan meningkatkan keberhasilannya dalam implementasi.

Setelah itu, perumusan opsi kebijakan perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi. Masing-masing opsi dievaluasi menggunakan kriteria yang jelas dan terukur, seperti:

1. Efektivitas: Sejauh mana opsi kebijakan mampu mengatasi masalah utama yang telah diidentifikasi. Misalnya, apakah pelatihan asesmen formatif yang dirancang mampu meningkatkan kompetensi guru dalam waktu tertentu?
2. Efisiensi: Apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan sumber daya yang tersedia, baik anggaran, tenaga, maupun waktu? Efisiensi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak membebani

sistem pendidikan secara berlebihan.

3. Keadilan (equity): Apakah kebijakan tersebut berdampak merata dan adil bagi seluruh sekolah dan siswa, termasuk mereka yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)? Kebijakan yang baik tidak boleh memperbesar kesenjangan antar kelompok sosial atau wilayah.

1. Kelayakan (feasibility): Apakah kebijakan dapat dilaksanakan secara realistis di lapangan? Ini berkaitan dengan ketersediaan regulasi pendukung, struktur organisasi, dan kapasitas pelaksana.

2. Akseptabilitas: Apakah kebijakan dapat diterima oleh guru dan pihak terkait? Tingkat penerimaan sangat menentukan kesuksesan implementasi.

Melalui proses analisis dan evaluasi yang matang, pembuat kebijakan dapat memilih satu atau kombinasi beberapa opsi yang paling menjanjikan, kemudian menyusun rencana implementasi yang terukur dan fleksibel. Ini termasuk menyusun indikator keberhasilan, mekanisme monitoring, serta evaluasi kebijakan secara berkala untuk mengukur dampak dan efektivitasnya dalam jangka menengah maupun panjang.

Dengan menggunakan pendekatan seperti ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga progresif dan adaptif terhadap tantangan baru dalam dunia pendidikan, seperti perubahan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, dan tuntutan pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Inovasi dalam Kebijakan Sekolah

Beberapa inovasi kebijakan yang diterapkan di sekolah,

khususnya di tingkat sekolah dasar, diarahkan untuk menjawab tantangan implementasi kurikulum ganda dan meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Inovasi-inovasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, berkeadilan, serta mendorong kemandirian siswa dalam belajar. Berikut adalah uraian yang lebih rinci mengenai inovasi tersebut:

1. Penyusunan Instrumen Evaluasi Formatif yang Beragam dan Kontekstual

Sekolah menyusun instrumen asesmen formatif yang tidak hanya terbatas pada ulangan atau tes tertulis, tetapi juga mencakup lembar observasi, jurnal belajar siswa, rubrik penilaian proyek, refleksi harian, dan penugasan berbasis konteks lokal. Pendekatan ini mendorong asesmen yang lebih autentik dan sesuai dengan realitas kehidupan siswa. Misalnya, dalam konteks pembelajaran IPS, siswa diminta untuk memetakan potensi ekonomi lokal di desanya sebagai bentuk tugas formatif. Inovasi ini sejalan dengan prinsip asesmen formatif menurut Black & Wiliam (1998), yang menekankan bahwa asesmen harus memberi umpan balik yang mendorong perbaikan belajar.

2. Pengembangan Pelatihan Guru Berbasis Komunitas Pembelajaran (Learning Community)

Sekolah membentuk komunitas belajar guru sebagai wadah pelatihan internal yang berkelanjutan. Model pelatihan ini bersifat partisipatif, reflektif, dan kolaboratif, di mana guru saling berbagi praktik baik, mendiskusikan studi kasus nyata di kelas, dan melakukan peer coaching. Tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap asesmen formatif dan kurikulum, komunitas ini

juga membangun budaya belajar yang positif antar guru. Heritage (2007) menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas guru menjadi kunci utama dalam transformasi evaluasi pembelajaran di sekolah.

3. Pemanfaatan Platform Digital untuk Asesmen dan Refleksi Siswa

Inovasi berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses asesmen dan refleksi belajar siswa. Sekolah menggunakan platform sederhana seperti Google Forms untuk kuis harian dan refleksi mingguan, serta menggunakan aplikasi portofolio digital (seperti Seesaw atau Padlet) untuk mendokumentasikan perkembangan proyek siswa. Dengan teknologi, guru dapat mengakses data belajar secara real time dan siswa dapat melakukan refleksi diri secara lebih personal. Ini memperkuat aspek regulasi diri siswa dalam proses belajar dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam evaluasi pembelajaran.

4. Keterlibatan Orang Tua dalam Pemantauan Perkembangan Siswa

Sekolah juga berinovasi dalam meningkatkan komunikasi dengan orang tua melalui laporan perkembangan bulanan yang lebih deskriptif, sesi parenting rutin, serta pelibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Orang tua tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi mitra dalam mendukung pembelajaran mandiri anak di rumah. Komunikasi dua arah ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan dan kemajuan belajar siswa, serta memperkuat ikatan antara sekolah dan keluarga.

5. Pembentukan Satgas Anti-Bullying dan Penguatan Tata Kelola Sekolah

Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, sekolah membentuk Satgas Anti-Bullying yang terdiri dari guru, siswa, dan perwakilan orang tua. Satgas ini bertugas melakukan sosialisasi, menangani laporan kasus, serta memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku. Di sisi lain, tata kelola sekolah diperkuat melalui transparansi pengambilan keputusan, evaluasi rutin, serta pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengawasan mutu sekolah. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya suasana yang mendukung tumbuhnya kemandirian dan partisipasi aktif siswa.

Dampak Positif Inovasi Inovasi-inovasi di atas telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Partisipasi aktif siswa meningkat karena mereka merasa terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai objek yang dinilai. Selain itu, kapasitas belajar mandiri juga berkembang, terlihat dari peningkatan refleksi diri, kemampuan menyusun tujuan belajar, dan keberanian mengajukan pertanyaan atau inisiatif dalam kegiatan kelas.

Lebih jauh, inovasi ini tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga membangun budaya kolaboratif di kalangan guru, memperkuat kepercayaan orang tua terhadap sekolah, dan menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih demokratis dan transparan. Dalam jangka panjang, inovasi kebijakan seperti ini menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman.

D. Kesimpulan

Permasalahan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dasar, terutama yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, merupakan tantangan nyata yang memerlukan perhatian serius. Pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka secara bersamaan di beberapa satuan pendidikan telah menimbulkan ketidaksinambungan dalam asesmen, pelaporan hasil belajar, serta pengelolaan administrasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya pemahaman guru tentang asesmen autentik, minimnya pelatihan profesional, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan sistemik terhadap hasil ujian sumatif.

Melalui pendekatan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka dan observasi lapangan, ditemukan bahwa penyebab utama dari permasalahan ini tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti keterampilan guru dan manajemen sekolah, tetapi juga dari faktor eksternal seperti kebijakan pusat yang belum sepenuhnya terimplementasi secara merata dan dukungan infrastruktur yang belum optimal. Literatur internasional seperti karya Black & William (1998), Heritage (2007), dan Au (2009) memberikan dasar teoritis bahwa asesmen formatif yang berkualitas dapat meningkatkan hasil belajar, mendorong keadilan pendidikan, dan mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna.

Perumusan kebijakan yang efektif memerlukan langkah-langkah sistematis, dimulai dari identifikasi masalah spesifik, analisis mendalam terhadap literatur dan data lapangan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, hingga evaluasi berbagai opsi kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, dan akseptabilitas. Implementasi kebijakan tidak boleh hanya berhenti

di level dokumen, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk inovasi konkret di tingkat sekolah.

Beberapa inovasi yang telah diterapkan, seperti penyusunan instrumen asesmen formatif yang kontekstual, pelatihan guru berbasis komunitas pembelajar, penggunaan platform digital, pelibatan aktif orang tua, hingga pembentukan Satgas Anti-Bullying, telah membuktikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas asesmen dan memperkuat kapasitas pembelajaran mandiri siswa. Inovasi-inovasi tersebut mencerminkan respons adaptif terhadap kebijakan nasional sekaligus inisiatif lokal yang berpihak pada kebutuhan nyata sekolah dan peserta didik.

Dengan demikian, reformasi kebijakan evaluasi pembelajaran di sekolah dasar harus berorientasi pada penguatan praktik asesmen formatif, peningkatan kapasitas guru, penyediaan dukungan infrastruktur, serta penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Pendekatan ini menjadi dasar penting untuk mendorong pendidikan yang adil, relevan, dan berkelanjutan bagi seluruh siswa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Au, W. (2009). *Unequal by Design: High-Stakes Testing and the Standardization of Inequality*. Routledge.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7–74.
<https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Brookhart, S. M. (2010). *How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom*. ASCD.

Chappuis, J., Stiggins, R. J., Chappuis, S., & Arter, J. A. (2012). *Classroom Assessment for Student Learning: Doing It Right – Using It Well* (2nd ed.). Pearson.

Hardianto, R., & Widodo, A. (2019). Persepsi Guru Sekolah Dasar terhadap Pelaksanaan Asesmen Formatif. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 23(2), 150–162.

<https://doi.org/10.21831/pep.v23i2.26711>

Heritage, M. (2007). Formative assessment: What do teachers need to know and do?. *Phi Delta Kappan*, 89(2), 140–145.
<https://doi.org/10.1177/003172170708900210>

Suyanto, S., & Lestari, U. (2017). Implementasi Penilaian Autentik dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah*, 5(1), 1–10.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

SD Negeri 9 Padang Panjang Timur. (2025). *Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka)*. Tidak diterbitkan.